



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN
JENAZAH AKIBAT INFEKSI *CORONAVIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa *Coronavirus Disease 2019* telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai penyakit infeksi emerging tertentu yang menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dunia, yang menyebabkan kematian;

b. bahwa untuk mencegah penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, maka perlu diatur pemulasaraan dan pemakaman jenazah akibat infeksi *Coronavirus Disease 2019*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Akibat Infeksi *Coronavirus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1755);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah sakit yang menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
20. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 46 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH AKIBAT INFEKSI *CORONAVIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Pekalongan.
5. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas Perkim Dan LH adalah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan;
7. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemic global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional.
8. Jenazah adalah Jenazah Orang yang meninggal akibat infeksi *Covid-19*.
9. Pemulasaraan jenazah yang selanjutnya disebut pemulasaraan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh petugas pemulasaraan terhadap jenazah pasien yang meninggal akibat infeksi *COVID-19* sesuai prosedur kesehatan dan agama, guna dipersiapkan untuk keperluan pemakaman.

10. Pemakaman jenazah yang selanjutnya disebut pemakaman adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh petugas/relawan untuk melaksanakan pemakaman terhadap orang yang meninggal akibat infeksi *COVID-19* dengan prosedur dan instrumen khusus.
11. Rumah Sakit adalah rumah sakit rujukan *COVID-19*.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
13. Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal, orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable *COVID-19*, dan orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
14. Probable adalah kasus suspek dengan ISPA berat/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan *COVID-19* dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
15. Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus *COVID-19* yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR
16. Penyakit Penyerta adalah penyakit lain yang dialami penderita selain penyakit utamanya, antara lain hipertensi, diabetes melitus, kanker, asma, penyakit paru obstruksi khronis, penyakit pada jantung, penyakit pada ginjal, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan lain-lain yang merupakan diagnosis spesialisik dan indikasi perawatan inap.
17. Surat Keterangan Kematian adalah surat keterangan tentang kematian meliputi identitas jenazah, saat kematian dan sebab kematian, yang dibuat oleh dokter yang memenuhi syarat administratif untuk menjalankan praktik kedokteran.

18. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP adalah dokter yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi/penyakit, dari awal sampai dengan perawatan di rumah sakit, baik pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
19. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekelilingnya.
20. DOA (*Death On Arrival*) adalah pasien yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan meninggal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan, Perangkat Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pemulasaraan dan pemakaman jenazah akibat infeksi *COVID-19*.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah mencegah penyebaran dan penularan *COVID-19* serta memberikan jaminan biaya pemulasaraan dan pemakaman jenazah akibat infeksi *COVID-19*.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pemulasaraan dan pemakaman Jenazah *COVID-19* dilaksanakan oleh Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan dan Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pemulasaraan dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Protokol Kesehatan dan ketentuan agama.

- (3) Penyelenggaraan pemulasaraan dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan perencanaan sebagai berikut:
- a. sasaran;
 - b. prosedur;
 - c. pelaksana/penyelenggara; dan
 - d. biaya/pendanaan.

Pasal 4

- (1) Pemulasaraan dan pemakaman jenazah akibat infeksi *COVID-19* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. jenazah suspek di Rumah Sakit sebelum keluar hasil swab;
 - b. jenazah pasien di Rumah Sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus *probable*/konfirmasi *COVID-19*; dan/atau
 - c. jenazah di luar Rumah Sakit dengan riwayat yang memenuhi kriteria *probable*/konfirmasi *COVID-19*, termasuk Pasien DOA (*Death On Arrival*) rujukan dari Rumah Sakit Lain.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian atau Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) dibuat oleh Dokter Rumah Sakit atau Dokter Puskesmas wilayah setempat dengan menyebutkan jenis penyakit penyebab kematian sebagai penyakit menular.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan pemulasaraan dan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a yaitu jenazah suspek, *probable* atau terkonfirmasi infeksi *COVID-19* yang meninggal di Rumah Sakit dan/atau di luar Rumah Sakit, dan dimakamkan di wilayah Daerah.
- (2) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga
Pelaksana/Penyelenggara

Paragraf 1
Pemulasaraan Jenazah

Pasal 6

- (1) Pemulasaraan Jenazah dilaksanakan di Rumah Sakit atau di Puskesmas.
- (2) Pemulasaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai standar pemulasaraan jenazah infeksi *COVID-19*.
- (3) Dalam hal Jenazah berada di lokasi yang jauh dan sulit terjangkau dari fasilitas kesehatan, pemulasaraan dapat dilaksanakan di luar Rumah Sakit atau Puskesmas oleh Tim pemulasaraan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. Ketua : Kepala Puskesmas;
 - c. Anggota : 1. petugas kesehatan; dan
2. relawan terlatih.

Paragraf 2
Pemakaman

Pasal 7

- (1) Pemakaman Jenazah *COVID-19* dikoordinasikan oleh Dinas Perkim dan LH.
- (2) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai standar pemakaman jenazah infeksi *COVID-19*.
- (3) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Perkim dan LH;
 - b. Ketua : Kepala BPBD;

- c. Anggota : 1. petugas pengamanan (TNI/Polri);
2. petugas dari Dinas Perkim dan LH;
3. petugas dari BPBD; dan
4. relawan pemakaman jenazah.

Paragraf 3

Peran Serta Masyarakat/Keluarga

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kematian akibat infeksi *COVID-19* di luar Rumah Sakit atau Puskesmas maka masyarakat/keluarga jenazah wajib melaporkan ke Puskesmas atau Satuan Tugas *Covid-19* terdekat.
- (2) Masyarakat/keluarga jenazah dilarang melaksanakan pemulasaraan dan pemakaman jenazah akibat infeksi *COVID-19*.

Pasal 9

- (1) Masyarakat/Keluarga dapat memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pada saat prosesi pemakaman.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Bagian Keempat

Biaya/Pendanaan

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit dan/atau Perangkat Daerah terkait dilarang memungut biaya pelayanan pemulasaraan dan pemakaman kepada keluarga jenazah atau pihak penanggung jawab jenazah.
- (2) Biaya pemulasaraan jenazah pasien yang dirawat di Rumah Sakit dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (3) Biaya pemulasaran jenazah pasien *DOA*, dan jenazah yang berada di luar rumah sakit dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.
- (4) Biaya pemakaman jenazah dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.
- (5) Dalam hal Rumah Sakit tidak memiliki tenaga pemulasara wanita, maka utk pelaksanaannya berkoordinasi dengan Tim Pemulasaraan Daerah, yang selanjutnya menugaskan relawan pemulasara wanita.
- (6) honor/insentif relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Komponen biaya pemulasaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) meliputi:

- a. honor/insentif petugas pemulasaraan jenazah;
- b. kain kafan dan bahan pemulasaraan;
- c. kantong jenazah;
- d. lakban;
- e. lem peti jenazah (*sealer*);
- f. peti jenazah;
- g. plastik erat;
- h. APD sekali pakai petugas pemulasaraan, meliputi baju APD, *face shield*, masker 3 (tiga) lapis atau masker N95, sarung tangan;
- i. APD tidak sekali pakai petugas pemulasaraan, meliputi sepatu *boot*; dan
- j. Bahan Bakar Minyak (BBM) atau biaya lain yang dikeluarkan apabila jenazah meninggal di luar Rumah Sakit.

Pasal 12

Komponen biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) meliputi:

- a. honor/insentif petugas pemakaman;
- b. APD sekali pakai petugas pemakaman, meliputi baju APD, masker medis, sarung tangan;
- c. perlengkapan pemakaman, antara lain tali, kayu, bambu, genset, mesin penyedot air/alkon;

- d. Bahan Bakar Minyak (BBM);
- e. makan dan minum petugas pemakaman; dan
- f. APD tidak sekali pakai petugas pemulasaraan, meliputi sepatu *boot* dan kacamata *google*.

Pasal 13

Bantuan dari pemerintah atau pihak lainnya berupa APD dan/atau obat suplemen yang diterima oleh Rumah Sakit atau Perangkat Daerah terkait, tidak dapat dimasukkan dalam daftar klaim.

Bagian Kelima Penganggaran

Pasal 14

- (1) Dana penyelenggaraan pemulasaraan dan pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dianggarkan dalam kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Apabila dana tidak mencukupi atau belum dianggarkan dalam kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka dapat menggunakan anggaran dari Dana Tak Terduga.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 15

Pimpinan Rumah Sakit, Koordinator Tim Pemulasaraan dan Koordinator Tim Pemakaman wajib menyampaikan laporan pelayanan pemulasaraan dan pemakaman kepada Bupati selaku Ketua Satuan Tugas *COVID-19*.

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Satuan Tugas *COVID-19* Kabupaten Pekalongan melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah akibat infeksi *COVID-19* yang dilaksanakan di Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 9 Februari 2021

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ASIP KHOLBIHI

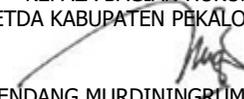
Diundangkan di Kaje
pada tanggal 9 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd

BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001